

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penulis menarik simpulan dari tujuan penelitian, rumusan masalah, hipotesis, dan pembahasan dalam bab ini. Oleh karena itu, untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009 sampai dengan tahun 2023 dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dipengaruhi oleh Pertumbuhan Ekonomi. karena ketimpangan distribusi hasil pembangunan dan akses ekonomi yang tidak merata. Pertumbuhan lebih dinikmati oleh kelompok menengah ke atas dan sektor tertentu, sementara kelompok miskin tetap terpinggirkan.
2. Penurunan IPM di DIY tanpa diikuti penurunan kemiskinan menunjukkan ketimpangan antara pembangunan manusia dan kesejahteraan ekonomi. Perbaikan pendidikan dan kesehatan belum cukup mendorong mobilitas ekonomi masyarakat miskin, terutama jika tidak dibarengi peningkatan akses terhadap pekerjaan dan pendapatan.
3. Angka pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Hal ini disebabkan karena mayoritas penduduk miskin bukanlah penganggur terbuka, melainkan pekerja informal dengan pendapatan rendah yang tidak mencukupi kebutuhan hidup layak. Mereka tidak tercatat sebagai penganggur, tetapi tetap hidup dalam kemiskinan. Urbanisasi penduduk juga turut mempengaruhi dinamika kemiskinan di DIY.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan peneliti, peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya membuat rencana pembangunan yang mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan., seperti pengembangan usaha kecil dan menengah, memperkuat strategi pembangunan yang inklusif, dengan memperluas akses masyarakat miskin terhadap sumber daya ekonomi, memperkuat sektor informal melalui perlindungan sosial dan pelatihan kerja.
2. Pemerintah disarankan untuk fokus pada peningkatan kualitas SDM di kelompok miskin, memperluas pelatihan kerja, serta menciptakan lapangan kerja yang layak. Program perlindungan sosial juga perlu diperkuat agar peningkatan IPM berdampak langsung pada penurunan kemiskinan.
3. Pemerintah hendaknya perlu fokus pada peningkatan kualitas pekerjaan, bukan sekadar jumlahnya. Regulasi yang disarankan meliputi peningkatan upah, pelatihan kerja, jaminan sosial, dan perlindungan bagi pekerja informal agar upaya pengentasan kemiskinan lebih efektif dan tepat sasaran.
4. Kajian yang lebih komprehensif terhadap topik yang sama hendaknya menggunakan variabel independen tambahan dan jangka waktu yang lebih panjang agar menghasilkan temuan penelitian yang lebih terkini, representatif, dan bermanfaat dalam memahami fenomena yang terjadi di wilayah tersebut.